



JURNAL SEGARA

<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/segara>

ISSN : 1907-0659

e-ISSN : 2461-1166

DOI : 10.15578/segara.v19i2.10137

ANALISIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR MELALUI PENDEKATAN BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN PESAWARAN

ANALYSIS OF COASTAL AREA MANAGEMENT THROUGH A COMMUNITY- BASED APPROACH IN PESAWARAN DISTRICT

Irma Lusi Nugraheni, Riyantika Eka Yuniar Risty*, Dinar Pratiwi

Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, No. 1, Gedung Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35141, Indonesia

Received: 15 May 2024 / Accepted: 8 August 2024 / Published: 30 August 2024

ABSTRAK

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah penyangga ibukota Provinsi Lampung yang memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berpotensi. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan yang diberikan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta mampu memberika manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder terutama masyarakat pesisir, dan meminimalkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi. Metode yang digunakan pada kajian ini yaitu studi kepustakaan. Hasilnya diketahui bahwa masyarakat pesisir di Kabupaten Pesawaran memiliki peran cukup aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Kata Kunci : Pesisir, Pengelolaan, Masyarakat

ABSTRACT

Pesawaran Regency is a buffer zone for the capital city of Lampung Province which has a fairly wide and potential coastal area. With a variety of rich biodiversity and environmental services provided, coastal and marine resources have high economic and ecological value. In order to ensure the sustainability of these resources, their management must be carried out in a planned and integrated manner and be able to provide the maximum benefit to all stakeholders, especially coastal communities, and minimize impacts and conflicts that could potentially occur. The method used in this study is literature study. The results show that coastal communities in Pesawaran Regency have a fairly active role in the management of coastal areas.

Keywords : Coastal, Management, Community

Corresponding author:
Riyantika Eka Yuniar Risty. Email: riyantika.eyr@gmail.com

Copyright © 2024

1. PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (UU Nomor 27 Tahun 2007). Wilayah pesisir yang terdiri dari ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, pantai memberikan manfaat sebagai penahan alami terhadap badai, banjir dan erosi. Di sisi lain, ekosistem pesisir merasakan dampak pencemaran dari kegiatan aktivitas di daratan dan laut karena aktivitas manusia yang banyak bermukim di wilayah pesisir dan melakukan kegiatan pemanfaatan seperti perikanan, transportasi dan pariwisata.

Wilayah pesisir memiliki potensi dan nilai ekonomi yang tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup memasukan instrumen ekonomi sebagai bagian dari kebijakan lingkungan. Definisi instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup tercatat pada Pasal 42 ayat 1 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Program pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat biasanya menargetkan masyarakat secara keseluruhan daripada satu kelompok pekerjaan. Dari perspektif kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan perencanaan pembangunan, memahami bagaimana karakteristik masyarakat pesisir terhadap masyarakat non-pesisir lainnya dapat menjadi pertimbangan dan justifikasi penting untuk menargetkan program spesifik terhadap masyarakat pesisir (Crawford et al., 2000). Keterlibatan dan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan wilayah pesisir adalah salah satunya kuncinya. Pengelolaan bersama adalah salah satu model alternatif untuk memulihkan kondisi ekosistem pesisir (Hartoto et al., 2009).

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah penyangga Ibu kota Provinsi Lampung. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 km² atau 117.377 Ha. Kontur wilayah Kabupaten Pesawaran bervariasi mulai dari daerah pesisir hingga perbukitan. Sebanyak 4 kecamatan terletak di

wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Marga Punduh, Kecamatan Padang Cermin, dan Kecamatan Way Ratai. Kecamatan Punduh Pidada merupakan kecamatan di wilayah pesisir yang memiliki jumlah pulau terbanyak mencapai 30 pulau. (BPS Kabupaten Pesawaran, 2021). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat diperlukan untuk pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan menyejahterakan, sehingga diperlukan kajian mengenai pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat di Kabupaten Pesawaran.

2. METODE

Pada penulisan ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003: 27). *Library research* ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca, tentang topik masalah yang sedang diteliti. Kemudian dilakukan pengamatan dan kajian yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya membuat kesimpulan hasil penelitian yang telah diupayakan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah

Kabupaten Pesawaran adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Luas Kabupaten Pesawaran secara keseluruhan adalah 1.173,77 km². Ibu kota Kabupaten Pesawaran berada di Kecamatan Gedong Tataan. Kontur wilayah Kabupaten Pesawaran bervariasi mulai dari daerah pesisir hingga perbukitan. Sebanyak 4 kecamatan terletak di wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Marga Punduh, Kecamatan Padang Cermin, dan Kecamatan Way Ratai. Kecamatan Punduh Pidada merupakan kecamatan di wilayah pesisir yang memiliki jumlah pulau terbanyak mencapai 30 pulau. Sedangkan, wilayah perbukitan paling tinggi berada di Kecamatan Way Lima yang mencapai 700 mDPL.

Produksi perikanan terbesar di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2020 berasal dari sektor perikanan tangkap mencapai 15.069,44 ton dengan jumlah rumah tangga sebanyak 2.403. Sementara itu, produksi perikanan budidaya menghasilkan 6.322,41 ton, dan produksi olahan hasil perikanan sebesar 76.260 kg. (BPS Kabupaten Pesawaran, 2021)

Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Pesawaran

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat atau komunitas yang hidup dan tumbuh di pesisir dan terikat dengan kearifan lokal setempat. Wilayah pesisir merupakan tempat yang sering digunakan untuk melakukan kegiatan oleh masyarakat terutama masyarakat pesisir, baik itu kegiatan yang berhubungan dengan religius, sosial kemasyarakatan maupun kegiatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kompleksnya pemanfaatan wilayah pesisir terutama kegiatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, seharusnya masyarakat pesisir tidak mengalami kekurangan atau maraknya kemiskinan pada masyarakat pesisir.

Garis kemiskinan di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2020 adalah 403.441 rupiah perkapita perbulan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran adalah sebesar 14,76 persen. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Pesawaran sebesar 2,18, dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,48 (BPS Kabupaten Pesawaran, 2021). Wilayah pesisir yang terdapat di Kabupaten Pesawaran diantaranya yaitu Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Marga Punduh, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Ratai dan Kecamatan Teluk Pandan.

Kecamatan Punduh Pidada merupakan kecamatan di wilayah pesisir yang memiliki jumlah pulau terbanyak mencapai 30 pulau. Kecamatan punduh pidada merupakan daerah pesisir dengan luas 110,46 km² (Statistik Kecamatan Punduh Pidada, 2013). Kecamatan ini ditetapkan sebagai kawasan minapolitan yang memiliki banyak potensi sumberdaya yang besar. Kecamatan ini memiliki potensi tangkapan dan budidaya hasil laut yang cukup besar seperti rumput laut. Namun, potensi tersebut bertolak

belakang dengan tingkat kesejahteraan pembudidaya rumput laut di Pulau Pahawang. Selain itu, peluang pasar yang besar tidak diimbangi dengan produksi rumput laut yang optimal, sehingga permintaan rumput laut sering tidak terpenuhi. Budiaya rumput laut di Pulau Pahawang layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Pendapatan rata-rata usaha budidaya rumput laut yang diterima selama 40 hari adalah sebesar Rp2.011.000 untuk luas 1.230 m² dan Rp482.833 untuk luas 300 m². (Putri dkk, 2014)

Kecamatan Teluk Pandan merupakan pemekaran dari Kecamatan Padang Cermin. Rata-rata pengeluaran total rumah tangga nelayan tradisional di Kecamatan Teluk Pandan adalah sebesar Rp33.825.627 pertahun, yang terdiri dari pengeluaran pangan sebesar Rp18.003.833 pertahun dimana pengeluaran terbanyak untuk padi-padian yaitu sebesar 13,48 persen dan pengeluaran non pangan sebesar Rp15.822.794 pertahun. Pengeluaran rumah tangga nelayan tradisional lebih besar untuk kebutuhan pangan dibandingkan dengan kebutuhan non pangan. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan tradisional lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan dibandingkan pemenuhan kebutuhan non pangan.

Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pesawaran

Pengelolaan Berbasis Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dengan tepat dan berdaya guna. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir berdasarkan potensi, karakteristik, dan kebutuhannya, sehingga mereka dapat menentukan pilihan terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir (Anwar & Maya, 2020 : 267).

Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*community based development*) memiliki keunggulan diantaranya pertama fungsi lingkungan di wilayah pesisir tetap terjaga, lestari dan berkelanjutan. Kedua peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pesisir yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Pembangunan wilayah pesisir terpusat pada masyarakat pesisir dan tidak lagi berbasis negara atau pemerintah. Akses sumber daya pesisir terbuka luas untuk masyarakat pesisir, tidak eksklusif di tangan pemerintah. Prioritas pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Manfaat sumber daya pesisir langsung dapat dinikmati oleh masyarakat pesisir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dimulai dari tahap penyusunan rencana, pelaksanaan pengawasan, hingga pengendalian pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

4. KESIMPULAN

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah penyangga ibukota Provinsi Lampung yang memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berpotensi. Untuk memaksimalkan potensi tersebut diperlukan pengelolaan pesisir yang baik. Pengelolaan Berbasis Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dengan tepat dan berdaya guna. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa tingkat keaktifan masyarakat pesisir dalam pengelolaan yaitu pada 1) Aspek Perencanaan, masyarakat telah cukup aktif berpartisipasi dalam hal perencanaan dan melihat sikap masyarakat yang ikut membahas perencanaan pengelolaan dan siap untuk melestarikan hutan mangrove. (2)

pulau kecil (PWP-3-K), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan

Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah melakukan beberapa upaya pembinaan guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, di antaranya adalah program GERBANG PELANA (Gerakan Membangun Masyarakat Pesisir yang Berdaya Guna), pengembangan kapasitas masyarakat, program pengelolaan pesisir berbasis masyarakat, dan program keberlanjutan daerah pengembangan laut berbasis masyarakat. (Anwar & Maya, 2020 : 276).

Berdasarkan hasil penelitian Rinaldo Davinsky dkk (2015) diketahui tingkat keaktifan masyarakat di Desa Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran pada aspek manajemen. Diantaranya yaitu (1) Aspek Perencanaan, masyarakat telah cukup aktif berpartisipasi dalam hal perencanaan dan melihat sikap masyarakat yang ikut membahas perencanaan pengelolaan dan siap untuk melestarikan hutan mangrove. (2) Aspek Pelaksanaan, dalam aspek ini masyarakat cukup aktif dalam pelaksanaan kegiatan (3) Aspek Pengawasan, masyarakat sangat mendukung dalam pelaksanaan pengawasan apabila ada masyarakat lain yang merusak hutan.

Aspek Pelaksanaan, dalam aspek ini masyarakat cukup aktif dalam pelaksanaan kegiatan (3) Aspek Pengawasan, masyarakat sangat mendukung dalam pelaksanaan pengawasan apabila ada masyarakat lain yang merusak hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, A., Qurniati, R., dan Setiawan, A. 2016. Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga Terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat Sekitar Mangrove (Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran). *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 4 No.3: 107-113.
- Anwar, Mashuril., dan Maya Shafira. 2020. Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2) : 266 – 287.
- Ari Atu Dewi, I Gede. 2018. Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis masyarakat: Community based development (Community Based Development:

- Community-Based Coastal Area Management Model). *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.18No. 2,:163-18.
- BPS. 2021. Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2021
- Davinsy, R., Asihing Kustanti., dan Rudi Hilmanto. 2015. Kajian Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(3) : 95 – 106.
- Fabianto, M.D., dan Pieter Th Berhitu. 2014. Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat. *Jurnal TEKNOLOGI*, 11(2) : 2054 : 2059.
- Indonesia. Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU No. 27 Tahun 2007. LN No. 84 Tahun 2007. TLN No. 4739.
- Marina Ulva, Fembriarti Erry Prasmatiwati, dan Eka Kasymir. 2020. Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Tradisional di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, Volume 8 No. 2
- Putri, Dede., Wuryaningsih D.S., dan Novi Rosanti. Analisis Pendapatan dan Strategi Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Pulau Pahawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran. *JIIA*. 2(1) : 56 – 63
- Suryanti., Supriharyono., dan Sutrisno Anggoro. 2019. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Semarang : UNDIP Press.

